

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Humas mempunyai peranan penting dalam menginformasikan aktivitas pemerintah kepada masyarakat. Humas memiliki fungsi mewakili publik kepada manajemen dan manajemen pada publik sehingga tercipta arus komunikasi dua arah, baik informasi maupun administrasi.

Humas harus mampu bertindak sebagai pemberi data dan informasi untuk mencegah adanya kesalahan informasi, membangun hubungan masyarakat yang baik dan berupaya menyebarluaskan atau mempublikasikan kegiatan kerja kepada masyarakat. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat, tentu pemerintah haruslah memberikan tugas humas sesuai dengan fungsi humas itu sendiri.

Humas merupakan fungsi manajemen yang membantu, menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi serta kerja sama suatu organisasi/perusahaan. Humas sangat berperan bagi perusahaan dalam menjalin hubungan yang baik serta menyampaikan informasi, opini, ide, pengetahuan kepada publik secara dua arah. Komunikasi dua arah merupakan tuntunan seorang humas agar dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku kelompok/perorangan agar sesuai dengan tujuan institusi yang diwakilinya. Secara umum tidaklah perlu mempunyai keahlian akademis, namun perlu untuk mewakili atribut yakni, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk dapat bergaul

dengan banyak orang, mempunyai integritas diri, mempunyai imajinasi diri, niat untuk mengembangkan wawasan. (Mulyana, 2004:78)

Disamping itu, humas juga bertujuan menyebarluaskan agar masyarakat sadar, sengaja, terencana dan terus menerus mengerti dan mengetahui kegiatan yang akan dilakukan, karena humas adalah fungsi manajemen dengan tugas melakukan penelitian terhadap pendapat, keinginan dan sikap publik, melakukan usaha-usaha penerangan dan hubungan-hubungan untuk mencapai saling pengertian, kepercayaan, hubungan interaksi dengan publik. Humas merupakan ujung tombak suatu organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintahan yang mewakili publiknya. Artinya, humas harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan yang diambil perusahaan atau instansi pemerintahan.

Di era reformasi saat ini, partisipasi masyarakat juga menjadi penentu dalam mencapai keberhasilan suatu program pemerintah termasuk program penerimaan calon pegawai negeri sipil. Masyarakat mempunyai hak untuk tahu tentang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini. Karena itu, pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Pemberian informasi kepada masyarakat tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh humas bukanlah hanya sebatas agar masyarakat tahu, tetapi lebih dari itu, humas mendorong agar masyarakat bisa ikut serta dalam seleksi tersebut. Dengan informasi yang diberikan maka secara langsung masyarakat akan mengetahui pada tanggal berapa, bulan berapa, apa saja yang dibutuhkan dan apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon

pegawai negeri sipil dan apabila informasi ini dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat secara luas maka secara otomatis peran/fungsi humas dapat berjalan sesuai dengan fungsi humas itu sendiri. Dengan informasi yang jelas, maka pemerintah berarti memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin mengabdikan dirinya sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten baru. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Sebagai kabupaten yang baru, tentu diperlukan kehati-hatian dalam menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS). Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan pada tahun 2013 merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja di sektor pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Minat masyarakat untuk ikut dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Kepulauan Meranti cukup tinggi. Ada sekitar 12.000-an pelamar baik dari masyarakat Meranti maupun masyarakat dari luar Kabupaten Kepulauan Meranti. Menghadapi hal ini humas harus bekerja lebih extra dalam memberikan informasi penerimaan calon pegawai negeri sipil tersebut.

Oleh karena pelamar calon pegawai negeri sipil tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti, tetapi juga dari luar Kabupaten Kepulauan Meranti, maka yang menjadi persoalan adalah terjadinya kesimpangsiurannya informasi yang diterima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk

formasi tahun 2013 dari 395 peserta yang diterima hanya 6 orang yang berasal dari putra daerah. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pelamar, dan mengakibatkan munculnya asumsi-asumsi dari masyarakat. Bila dilihat mengapa timbul kecemburuan tersebut, ternyata disebabkan oleh keterbatasan media yang digunakan dalam menyebarkan informasi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Di sinilah muncul persoalan tentang strategi yang dilakukan humas.

Dari fakta di atas terlihat ada persoalan tentang bagaimana strategi humas pemerintah dalam menginformasikan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hal ini penulis membahas melalui suatu penelitian yang berjudul “ **Strategi Humas Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Memberikan Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Masyarakat** “.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru dan tentu membutuhkan tenaga administratif untuk menjalankan pemerintahan yang memahami kondisi daerah setempat. Faktanya yang diterima sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) justru banyak berasal dari luar daerah. Karena itu, peran humas menjadi sangat penting.
2. Penelitian ini memiliki relevansi dengan jurusan penulis, yaitu konsentrasi *Public Relations*. Selain itu penulis merasa sanggup, baik dari segi waktu,

biaya, buku-buku, maupun pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan istilah-istilah berikut :

1. Strategi Humas

Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya (Ruslan, 2008: 37). Sedangkan strategi humas menurut Ahmad S. Adnanputra adalah “ alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan *public relations* dalam kerangka suatu rencana *public relations* (*public relations plan*) (Rosady, 2003:124).

2. Humas (Hubungan Masyarakat)

Humas menurut Glenn dan Denny Griswold dalam bukunya “ *Your Public Relations*“ adalah suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik (Abdurrahman, 1992 : 167).

3. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja untuk pemerintah, perusahaan dan sebagainya. Selain itu, pegawai negeri sipil berarti orang

yang bekerja untuk pemerintah dan sebagai abdi negara yang mengabdikan diri untuk negara dan melayani setiap masyarakat yang membutuhkannya (Muhizar Mukhtar, dkk. 1997 : 113).

Jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah orang-orang yang bakal bekerja untuk pemerintah sebagai abdi negara dan melakukan kegiatan-kegiatan atau menyusun strategi-strategi yang telah diusung oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Beberapa permasalahan pokok yang muncul terkait dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), misalnya kesimpang-siurannya informasi penerimaan, minimnya peserta yang berasal dari daerah setempat jika dibandingkan dari luar, dan sedikitnya pelamar daerah yang lulus dibandingkan dengan pelamar dari luar.

2. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan, penulis membatasi masalah pada strategi yang digunakan oleh humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada masyarakat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana strategi yang digunakan oleh humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada masyarakat ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan informasi pemerintah kepada masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Untuk dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan penulis dan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang

dilakukan oleh KIRANA AMBARWATI tahun 2009 tentang Peran dan Strategi Public Relations Dalam Membangun Citra PT. (Persero) Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adisutjipto. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk peran dan strategi yang digunakan oleh *public relations* PT. (PERSERO) Angkasa Pura I cabang Bandara Internasional Adisutjipto dalam membangun citra bandara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui studi kasus pustaka, dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *public relations* PT. (PERSERO) Angkasa Pura I cabang Bandara Internasional Adisutjipto menjalankan keempat kategori peran sesuai konsep Dozier dan Broom, yakni sebagai penasehat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah dan teknisi komunikasi.

Kedua, adalah penelitian oleh M. FADLI tahun 2009 tentang Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Menyebarkan Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana strategi humas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyebarkan informasi pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif, data primer dan data sekunder. Strategi humas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang dilakukan melalui pendekatan dalam kerja sama dengan media massa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

dihumas itu sendiri. Ada pun faktor penghambatnya adalah besarnya jumlah penduduk dari luasnya Kabupaten Rokan Hilir sehingga sulit bagi humas untuk terjun langsung ketengah-tengah masyarakat.

Penelitian terdahulu ini sangatlah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Didalam penelitian terdahulu yang dibahas adalah bentuk peran dan strategi yang digunakan oleh *public relations* PT. (PERSERO) Angkasa Pura I cabang Bandara Internasional Adisutjipto dalam membangun citra bandara. Penelitian selanjutnya adalah tentang Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menyebarluaskan Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat Di Kecamatan Rimba Melintang. Yang menjadi fokus penelitiannya adalah strategi humas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyebarluaskan informasi pembangunan. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah tentang strategi humas Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada masyarakat. Yang dikaji adalah strategi humas Kabupaten Kepulauan Meranti yang digunakan untuk memberikan informasi yang bisa diterima oleh masyarakat.

G. Kerangka Teoretis

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teoritis merupakan dasar berpikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang berguna mengarahkan penelitian.

1. Strategi Humas

Strategi Humas menurut Ahmad S. Adnanputra, merupakan panduan awal dari perencanaan dan manajemen yang akan dan telah direncanakan melalui kebijakan organisasi/instansi untuk mencapai suatu tujuan (Rosady,2007:133).

Strategi pada dasarnya merupakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah taktik untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapula yang mengatakan bahwa strategi sebagai rencana dan memberi penjelasan atas metode yang dipakai untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Yosal,2005:89).

Tahapan fungsi-fungsi manajemen, tahap pertama adalah menetapkan tujuan (obyektif) yang hendak diraih, posisi tertentu atau dimensi yang ingin dicapai sesuai dengan perencanaan (*statement of organization destination*) yang telah diperhitungkan dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen suatu organisasi bersangkutan.

Strategi *public relations* tersebut kemungkinan menemui kegagalan dalam tahap penyelesaian permasalahan tersebut (melibatkan berbagai pihak yang bersangkutan). Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah memilih salah satu sarana atau komponen peraduan dari sarana strategi *public relations* tersebut diatas melalui jalur taktikal, selanjutnya ditentukan sarana taktikal atau strategi *public relations* melalui program

dan fungsi manajemen humas. Hal tersebut dilakukan dengan merujuk kepada salah satu atau perpaduan strategi.

Landasan umum dalam proses penyusunan strategi *public relations*, menurut Ahmad S. Adnanputra dalam makalah “PR strategi (1990) yang berkaitan dengan fungsi PR/Humas secara integral melekat pada manajemen suatu perusahaan/lembaga yaitu :

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul
- 2) Identifikasi unit-unit sasaran
- 3) Mengevaluasi mengenai pola dan kadar sikap dan tidak unit sebagai sasarannya.
- 4) Mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasaran
- 5) Memilih opsi atau unsure taktikal strategi *public relations*
- 6) Mengidentifikasi dan evaluasi terhadap perubahan kebijaksanaan atau peraturan pemerintah dan lain sebagainya
- 7) Langkah terakhir adalah menjabarkan strategi *public relations*, dan taktikal atau caramenerapkan langkah-langkah program yang telah direncanakan.

Langkah-langkah pokok dari berbagai aspek pendekatan dan strategi komunikasi *public relations* dalam upaya untuk menjalin berbagai hubungan positif dengan publik internal dan publik eksternal tersebut diatas, dapat ditarik suatu pengertian yang mencakupi peranan Humas diberbagai kegiatan dilapangan yaitu :

- 1) Menginformasikan
- 2) Menerangkan
- 3) Menyarankan
- 4) Membujuk
- 5) Mengundang
- 6) Menyakinkan (Rosady,2007:139-144)

Adapun strategi *public relations* dalam membina hubungan internal untuk meningkatkan citra perusahaan tidak terlepas dari bagaimana cara berkomunikasi public relations dengan karyawan, dengan strategi komunikasi inilah permasalahan karyawan dapat diketahui antara lain :

- 1) Kemampuan orang untuk menyampaikan
- 2) Pemilihan secara seksama apa yang akan disampaikan oleh komunikator
- 3) Saluran komunikasi yang jelas dan langsung
- 4) Media yang memadai untuk menyampaikan pesan
- 5) Penentuan waktu dan penggunaan media yang tepat
- 6) Tempat-tempat penyebaran yang memadai apabila diperlukan untuk memudahkan penyampaian pesan, asli, tidak dikurangi, tidak diubah, terarah dan tepat (Moekijat,1993:21-22).

Dalam pembentukan strategi perusahaan seorang public relations akan dipengaruhi oleh unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan lingkungan, kondisi, visi, atau arah tujuan dan sasaran dari suatu pola yang

mendasar budaya perusahaan bersangkutan (*corporate cultural*) yaitu antara lain :

- 1) Secara makro, lingkungan perusahaan/lembaga tersebut akan dipengaruhi oleh unsur-unsur : kebijakan umum (*public policy*), budaya (kultur) yang dianut, sistem perekonomian dan teknologi yang dikuasai oleh organisasi bersangkutan.
- 2) Secara mikro tergantung dari : misi perusahaan, sumber-sumber yang dimilikinya berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya guna lainnya yang dikuasai, sistem pengorganisasian, dan rencana atau program dalam jangka pendek atau jangka panjang, serta tujuan dan sasarnya yang hendak dicapai (Rosady,1999:114)

Seorang *public relations* harus mempunyai rencana strategi perusahaan dalam jangka panjang, yaitu menetapkan suatu rencana umum prediksi jangka panjang dalam kurun waktu tertentu kedepan. Sesuai dengan fungsi *public relations* yaitu selain terkait erat dengan fungsi manajemen perusahaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, disamping itu manajemen *public relations* yang prinsipnya menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik (*reciprocal two ways traffic communications*) antara lembaga dengan publik sebagai khalayak sasarnya (Rosady,1999:121).

Sebagai landasan perencanaan dan program kerja manajemen strategi *public relations* secara garis besar memenuhi faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Melakukan atau merancang suatu SWOT, yaitu untuk memprediksi sejauh mana sumber-sumber kekuatan atau kemampuan dan posisi kelemahan (*strengths and weaknesses*), yang dilihat dari segi internalnya. Kemudian sejauh mana mengevaluasinya mengenai kesempatan atau peluang yang ada dan bahkan berupa ancaman yang datang dari eksternalnya.
- 2) Mengevaluasi pengkomunikasian, dan pencapaian tujuan yang diharapkan dimasa-masa mendatang khususnya, dan mencapai tujuan bersama yang terinteraksi dengan tujuan organisasi/lembaga pada umumnya.
- 3) Melaksanakan manajemen dan aktivitas *public relations* berdasarkan pengumpulan fakta, perencanaan, komunikasi, dan pengevaluasian (Rosady,1999:121-122).

Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang berencana dan berkesinambungan, yang dengan itu organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berupaya membina pengertian, simpati dan dukungannya dari mereka yang ada kaitan atau yang ada hubungannya dengan jalan menilai pendapat umum diantara mereka, untuk mengorelasikan, sedapat mungkin, kebijakan dan tata cara mereka, yang dengan informasi yang berencana dengan tersebar luas, mencapai kerja sama yang lebih produktif dan pemenuhan kepentingan bersama yang lebih efisien (Efendy,2002:134).

Menurut *Cutlip-Center-Broom* dalam bukunya *Effective Public Relations* ruang lingkup humas mutakhir mencakup tujuh bidang pekerjaan. Sebagaimana yang dikemukakan mereka: *The contemporary meaning and practice of public relations includes all of the following activities and specialities (publicity, advertising, press agency, public affairs, issues management, lobbying, and investor relations)*. Dengan demikian, menurut Cutlip dan rekan, perkembangan mutakhir humas mencakup seluruh kegiatan tersebut yaitu : publisitas, iklan, *press agency*, *public affairs*, manajemen isu, lobi dan hubungan investor.

Ruang lingkup pekerjaan humas sebagaimana dikemukakan Cutlip dan rekan tersebut masih dapat dipepadatkan menjadi enam bidang pekerjaan, yaitu dengan menjadikan iklan sebagai bagian dari pemasaran dan menggabungkan *press agency* ke dalam publisitas karena pada dasarnya *press agency* merupakan bagian dari publisitas sementara iklan menjadi salah satu kegiatan pemasaran.

Dengan demikian, ruang lingkup pekerjaan humas dapat dibagi menjadi enam bidang pekerjaan, yaitu :

- 1) Publisitas
- 2) Pemasaran
- 3) Public Affairs
- 4) Manajemen isu
- 5) Lobi dan
- 6) Hubungan investor (Morissan,2008:13-14)

Adapun definisi public relations yang diambil dari “*The British Institute Of Public Relations*” adalah :

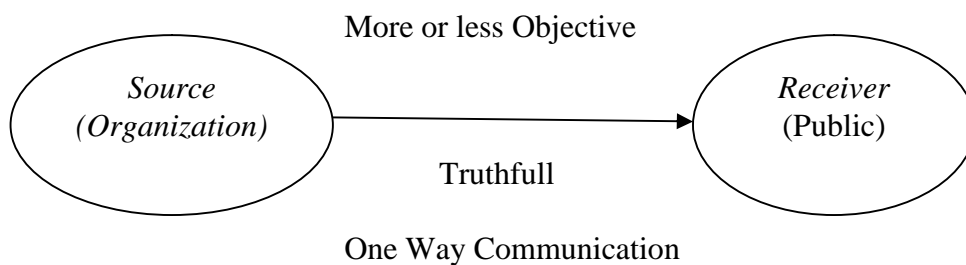
- 1) Aktivitas *public relations* adalah mengelola komunikasi antara organisasi dan publiknya.
- 2) Praktek *public relations* adalah memikirkan, merencanakan dan mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan publiknya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa humas atau *public relations* memiliki peranan sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi/lembaga yang diwakili dengan publiknya, sebagai relationship yang berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya dan sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi/lembaga serta sebagai upaya untuk menciptakan citra yang baik bagi organisasi atau lembaganya.

Kemudian menurut Edward L. Bernays mengatakan humas memiliki tiga fungsi utama yaitu :

- 1) Memberikan penerangan kepada masyarakat.
- 2) Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
- 3) Usaha-usaha untuk menginteraksi sikap dan tindakan dari perusahaan/lembaga kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada perusahaan atau lembaga.

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, maka teori merupakan landasan awal dalam membangun konsep berpikir. Teori yang digunakan yaitu model *Public Information* (model komunikasi simetris satu arah) yang dikemukakan oleh Grunig. Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah seperti pada gambar dibawah ini:



Sumber : Teori Grunig (Rosady, 2010: 103)

Dalam hal ini humas bertindak seolah-olah sebagai *Journalist in resident*. Berupaya membangun kepercayaan organisasi melalui proses komunikasi searah (*one way process*) dan tidak mementingkan persuasif. Seolah-olah bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan publisitas, informasi dan berita ke publik. Disamping itu, mampu mengendalikan berita melalui bekerja sama dengan media massa. Unsur kebenaran dan objektivitas pesan (informasi) selalu diperhatikan oleh pihak nara sumbernya.

Yang menjadi tujuan humas adalah usaha agar masyarakat sadar, sengaja, terencana dan terus menerus mengerti dan mengetahui kegiatan

yang dilakukan oleh organisasi/lembaga. Selain itu, humas merupakan mediator yang berada antara pimpinan organisasi dengan publiknya baik dalam upaya membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal. Sebagai publik, mereka berhak mengetahui rencana kebijaksanaan, akitivitas program kerja dan rencana-rencana usaha suatu organisasi/lembaga berdasarkan keadaan, harapan dan sesuai dengan keinginan publik sasarannya.

Humas dalam pemerintahan merupakan wadah yang memiliki fungsi dan tugas pokok sebagai penyebar informasi dan corong dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah. Selain itu humas juga memiliki peranan untuk senantiasa meneliti, menganalisa dan menyaring segala kritikan, tanggapan, sikap dan pendapat serta reaksi yang datang dari masyarakat demi kelancaran program-program pemerintah.

2. Informasi

Informasi adalah suatu usaha untuk memberikan penerangan atau pemberitahuan tentang suatu kabar atau berita. Dan informasi juga dapat disebut sebagai pesan, pesan terjadi karena ada penyampai pesan dan penerima pesan.

Informasi berarti menambah pengetahuan tentang data untuk membuat keputusan. Data disini tidak selalu fakta, tetapi juga merupakan perintah atau pesan. Dalam arti luas, informasi dapat disejajarkan dengan penerangan (Tondowidjono, 2004:5).

. Dalam penyampaian informasi ada berbagai macam cara yang dilakukan agar pesan yang ingin disampaikan dapat sampai pada sasaran yang ingin dituju. Ada beberapa media yang dapat digunakan dalam proses penyampaian pesan, yaitu :

1) Media Cetak

Dalam memberikan informasi kepada publiknya, humas menggunakan media cetak sebagai salah satu media komunikasi, seperti : surat kabar, majalah, tabloid.

2) Media elektronik

Media elektronik sebagai salah satu media dalam proses komunikasi, seperti : TV, Radio dan Internet.

3) Audio-visual

Media komunikasi yang terdiri dari slide dan kaset video atau gulungan film dokumenter.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai merupakan salah seorang yang berperan penting dalam suatu lembaga baik swasta dan pemerintah yang telah diangkat dan menjadi tenaga kerja pada perusahaan swasta/pemerintah. Menurut bab 1 pasal 1 UU No. 14 tahun 1969, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan di dalam di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam “*Kamus Bahasa Indonesia*” pegawai adalah orang yang bekerja untuk pemerintah, perusahaan dan sebagainya. Sedangkan pegawai negeri sipil berarti orang yang bekerja untuk pemerintah dan sebagai abdi negara yang mengabdikan untuk negara dan melayani setiap masyarakat yang membutuhkannya.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil terbagi dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif.

1. Pegawai Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang no. 43 tahun 1999.

Pasal 1 angka 1: Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1): Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

2. Pegawai Ekstensif

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri dalam hukum Kepagawaian.

Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut UU No. Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sekretariat Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri sipil daerah Provinsi/Kabupaten yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada Pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2013 merupakan tuntutan pemerintah untuk mengisi tenaga-tenaga kerja yang

dibutuhkan dan tenaga/pegawai tersebut merupakan orang-orang yang mempunyai kualitas sesuai apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam penerimaan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti bekerja sama dengan humas sekretariat daerah dalam menyebarkan informasi dan prosedur-prosedur penerimaan pegawai negeri sipil dengan strategi yang telah dirancang dan di susun serta di laksanakan oleh humas pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

H. Konsep Operasional

Humas memiliki peranan dan fungsi sebagai penghubung atau komunikator dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang diwakili untuk menciptakan dan membina saling pengertian antara organisasi/perusahaan dengan publiknya. Untuk mengetahui strategi humas pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada masyarakat penulis menetapkan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Humas merencanakan program penyebaran informasi.
- b. Humas memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat.
- c. Humas mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Humas bertindak menjadi komunikator sekaligus mediator.

- e. Humas memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, Elektronik, dan audio-visual. melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan pemberian informasi.
- f. Humas melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan pemberian informasi.

I. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. Jl. Dorak NO 01 Selat Panjang.

2. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah 3 orang. Subjek penelitian inilah yang berfungsi sebagai responden/informan.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan informasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kepada masyarakat.

3. Sumber Data

- a. Data primer. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Humas dan staff Humas yang berjumlah 3 orang.

- b. Data sekunder. Sumber data sekunder penelitian ini adalah observasi dan dokumen-dokumen yang terkait dengan bidang kehumasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yakni mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah yang dapat memberi informasi sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Observasi, yakni mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk melihat kondisi secara rill yang terjadi pada bagian humas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Dokumentasi, yakni cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku, tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat bukan dalm bentuk angka. Nantinya peneliti hanya memaparkan situasi dan peristiwa, dimana peneliti tidak mencari dan menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Jalaluddin 2004:24-25).

6. Validitas data

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004: 330-331). Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan nara sumber yaitu membandingkan hasil wawancara humas Kabupaten Kepulauan Meranti dengan informasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang masih simpang-siur.

7. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif data diteliti atau dijelaskan dengan apa adanya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, konsep operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Bab ini membahas tentang gambaran umum sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti, tugas humas pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kondisi dan struktur humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III PENYAJIAN DATA

Bab ini memaparkan penyajian data tentang strategi humas Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Memberikan Informasi yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan dan faktor pendukung lainnya yang berhubungan dengan informasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada instansi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini menganalisis data terkait dengan strategi yang digunakan humas pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

